

INSENTIF UNGKIT BURSA KARBON

Bursa karbon masih membutuhkan dukungan besar dari regulator maupun industri agar dapat bergeliat dan memenuhi potensinya menjadi bursa karbon yang diperhitungkan di kancah global.

Fahmi AB & Rahmad Fauzan
redaksi@bisnis.com

Berdasarkan data IDXCarbon, total volume transaksi di bursa karbon mencapai 1.414.629 ton CO₂ sampai periode Selasa (11/2). Nilai transaksi ini telah mencapai Rp70,85 miliar dengan frekuensi transaksi mencapai 204 kali. Terdapat 107 pengguna jasa di IDXCarbon.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI Ignatius Denny Wicaksono mengatakan aktifitas perdagangan di bursa karbon tergolong tumbuh pesat. Adapun, ke depan peluang pertumbuhan masih terbuka didorong oleh sejumlah faktor.

"Peluang terbuka, apalagi jika didukung insentif dan disinsentif," katanya setelah acara Bisnis Indonesia Forum bertema *Mengeksplorasi Masa Depan Perdagangan Karbon Indonesia* pada Rabu (12/2).

Menurutnya, pajak karbon dapat menjadi faktor pendorong utama demi memperkuat perdagangan di bursa karbon yang hingga saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan itu.

"Pajak belum ada. Kalau enggak *comply* enggak dikenakan pajak. Sekarang belum ada ketentuan itu. Padahal itu bisa menjadi katalis penting untuk menggerakkan bursa karbon," terangnya.

Selain itu, peluang datang dari adanya perdagangan luar negeri di bursa karbon Indonesia. Pelaksanaan perdagangan luar negeri memang telah dibu-



Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono (dari Kanan), Direktur Pengembangan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lufalyd Ernanda, Direktur Pemberitaan & Produksi sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya

Kementerian Perindustrian Sri Gadis Pari Betti, Praktisi Energi/ Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Salya Widya Yudha, Corsec PT Pertamina New & Renewable Energy Dicky Septiadi, dan VP Transisi Energi dan Perubahan Iklim PT PLN (Persero) Anindita Satriya Surya berbicara sehubungan dengan acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (12/2).

juga dilakukan pengembangan ekosistemnya," terangnya.

Sejauh ini, menurutnya, belum ada batas atas emisi maksimum di industri. Akibatnya, tidak ada insentif atau disinsentif untuk pengurangan karbon. Dari kacamata pelaku industri, Corsec Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) Dicky Septiadi mengata-

Kalau enggak *comply* enggak dikenakan pajak. Sekarang belum ada ketentuan itu. Padahal itu

kredit dari pembangkit listrik geothermal Lahendong Unit 5 dan 6 pun masih ada sekitar 380.000 tCO₂e. Karbon kredit dari dua pembangkit ini bakal segera diperdagangkan di IDX Carbon.

LAPOR EMISI

Adapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meng-

menperin akan mempersiapkan peta jalan terkait dengan penetapan batas emisi dan pemberian *allowance* pelaku usaha.

"Dari sektor industri mungkin belum tentu semua pelaku siap karena industri menggunakan energi, tentu energi akan memicu emisi," tuturnya.

Untuk membantu penyusunan peta jalan batas emisi industri, Kemenperin memerlukan *database* yang tepat. Terlebih, setiap sektor manufaktur dinilai menghasilkan emisi yang berbeda-beda.

"Setelah surat edaran, akan ada kewajiban atau aturan Kemenperin terkait pengurangan emisi sektor industri dan di dalamnya bagaimana perdagangan karbon di sektor industri. Ini akan ada skala prioritas, mana subsektor yang siap untuk didahulukan, ada fase-fasenya, prioritasnya," terangnya.

Kemenperin telah menyortir sembilan subsektor industri prioritas yang akan didorong dekarbonisasi yaitu semen, amonia, besi dan baja, pulp & kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta alat transportasi.

Lebih lanjut, terdapat opsi perdagangan emisi untuk industri dengan *allowance* berbasis intensitas emisi (*allowance fee*). Adapun skema yang diterapkan yakni pendekatan batas atas dengan intensitas emisi yang merujuk pada Standar Industri Hijau (SIH) dan *inventory profile* emisi sebagai dasar penentuan izin emisi.

ka sejak 20 Januari 2025, dengan realisasi volume transaksi hingga 31 Januari 2025 sebesar 49.815 tCO₂e dan nilai transaksi mencapai Rp4,02 miliar.

"Ada peluangnya [perdagangan luar negeri di bursa karbon]. Akan tetapi, pasar karbon itu pasar *quality*, jadi tergantung seberapa berkualitas unit karbon itu dan seberapa bisa dipakai unit karbonnya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisidor OJK Mahendra Siregar mengatakan dalam mendorong perdagangan di bursa karbon Indonesia dibutuhkan peran pemerintah. Sebab, produk karbon yang terserap nantinya menjadi kewenangan pemerintah.

"Mulai dari produk karbon, registrasinya, sertifikasinya, surveynya, dan semua dari sisi pasokan. Dari sisi permintaan

kan tambahan *revenue* bisa diperoleh dari aspek-aspek energi terbarukan seperti geothermal, solar PV, dll.

Selain itu, jelasnya, bisnis yang relevan dengan masa depan perdagangan karbon adalah *nature-based solution*. Sebagai salah satu negara penghasil

karbon terbesar, bisnis *nature-based solution* didukung oleh karbon yang berasal hutan, kelautan, agrikultur, hingga sumber penghasil karbon lainnya.

"Selama ini yang *in charge* *nature-based solution* pasti foreigners. Entah itu dari Australia atau dari negara lain. Nah, pemain lokal sekarang sudah dikasih panggung oleh pemerintah untuk jadi *key player*, dan barangnya ada di sini," kata Dicky.

Dalam hal ini, PNRE sebagai unsur badan usaha milik nega-

bisa menjadi katalis penting untuk menggerakkan bursa karbon.

ra (BUMN) telah bekerja sama dengan Perum Perhutani untuk masuk ke dalam hal pengelolaan kawasan hutan. Tujuannya, PNRE membantu serta berkolaborasi dalam hal konservasi. "Sehingga ketika pada waktunya disertifikasi, karbon di dalam negeri sudah bisa masuk ke pasar *existing*. Inilah kenapa saya nilai hal ini perlu diperjuangkan," ucapnya.

Saat ini, PNRE juga tengah menyiapkan karbon kredit dari pengoperasian biogas *power plant* Sei Mangkei. Dengan rincian, 120.000 tCO₂e dari sektor limbah, serta 31.000 tCO₂e dari sektor energi. Selain itu, komersialisasi karbon

ungkap rencana penerbitan surat edaran dan peraturan baru untuk pelaku usaha industri yang mewajibkan laporan emisi karbon gas rumah kaca dan polutan.

Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Kemenperin, Sri Gadis Pari Betti mengatakan telah merancang berbagai *roadmap* dalam rangka mengurangi emisi karbon, sekaligus mendorong penciptaan industri hijau.

"Dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran industri wajib laporan emisi, bukan hanya emisi GRK tapi juga polutan," katanya.

Kemenperin telah menggodok peta jalan perdagangan karbon yang rampung tahun lalu. Peta jalan itu merujuk pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Selanjutnya, tahun ini Ke-

"Kami akan komitmen perubahan iklim dan NZE dari sektor industri dengan 2 *roadmap* itu harus berbarengan artinya ketika nanti dekarbonisasi, upaya sektor industri juga perlu bantuan pemerintah dan industri juga bagaimana itu efisien."

Sedangkan, Praktisi energi sekaligus Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2020/2025, Salya Widya Yudha, menilai ada berbagai tantangan perdagangan karbon. *Pertama*, harga kredit karbon dapat berfluktuasi secara signifikan. *Kedua*, berbagai negara dan wilayah memiliki peraturan dan standar yang berbeda-beda untuk perdagangan karbon. *Ketiga*, perlu sistem pemantauan dan verifikasi yang kuat mencegah penipuan dan memastikan integritas pasar karbon. *Keempat*, tidak semua industri dan perusahaan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon. *Kelima*, terdapat risiko manipulasi pasar, di mana perusahaan dapat melakukan perdagangan spekulatif atau penimbunan kredit karbon untuk menaikkan harga. (Akhil Rahmat/Rendi Aska)



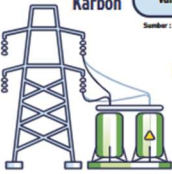
Geo Yudi Bursa Karbon di dan Indeks ESG Gagal "Memperjaya"

Indonesia memiliki potensi pasar perdagangan karbon yang diperkirakan dapat mencapai nilai tambahan hingga Rp3.000 triliun. Sebagai langkah awal, target utama perdagangan karbon adalah sektor energi yang dilanjutkan ke 9 subsektor lain.

Kendati demikian, sejak diluncurkan pada 2023, perdagangan karbon di Indonesia masih terbilang minim. Total nilai transaksinya baru mencapai Rp70,85 miliar hingga Selasa (11/2). Sejumlah tantangan masih perlu dicari solusi agar transaksi di bursa karbon kian bergeliat.



Sejumlah Proyek Perdagangan Karbon



Dalam jangka pendek dan menengah, Pertamina NRE melanjutkan produksi carbon credits untuk diperdagangkan di IDX Carbon:

Total penerbitan SPE sebesar 4 juta ton CO₂e pada 4 proyek, sementara 1 proyek masih dalam proses validasi ulang pada PLTGU Muara Karang Blok 3.

Total penjualan SPE yang berasal dari PLTGU Muara Karang dan PLTGU Gunung Wujul sampai Desember 2024 sebesar 53,8 ribu ton CO₂e.

PLTGU Muara Tawar Blok 2, Reduksi Emisi : 34.960 ton CO₂e

PLTGU Gunung Wujul, Reduksi Emisi : 12.932 ton CO₂e

PLTGU Grati Blok 2, Reduksi Emisi : 1.240.907 ton CO₂e

PLTGU Priok Blok 4, Reduksi Emisi : 2.724.831 ton CO₂e

Geothermal Lahendong Unit 5 & 6

2016 41,3k tCO₂e

2017 209k tCO₂e

2018 204,8k tCO₂e

2019 205,8k tCO₂e

2020 202,9k tCO₂e

2021-2022 380k tCO₂e

2021-2024 120k tCO₂e

2021-2024 31k tCO₂e

Perdagangan Karbon di IDX Carbon

Periode Data 26 September 2023–11 Februari 2025, IDX Carbon

	12-Feb-25	26-Sep-23
Total Volume Transaksi	1.414.629 ton CO ₂ e	459.953 ton CO ₂ e
Total Nilai Transaksi	Rp 70,85 Miliar	Rp 29,21 Miliar
Pengguna Jasa Bursa Karbon	107	16
Frekuensi Transaksi	204 Kali	22 Kali

Sumber : OJK, dilatih

Sumber : Pertamina NRE, dilatih